

PENGARUH PENGAWASAN PREVENTIF, PENGAWASAN DETEKTIF DAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP EFEKTIVITAS PENGENDALIAN ANGGARAN OPD SURABAYA

Shelby Yelina Biantoro
shelbyyelina18@gmail.com
Endang Dwi Retnani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to examine the effect of preventive supervision, detective supervision, and budget based on the performance on the effectiveness of budget control of Surabaya Regional Device Organization. The research was quantitative approach. While, the data collection technique used purposive sampling, in which the sample was based on criteria given. In line with, there were 71 samples from 27 Surabaya Regional Device Organization. Moreover, the data analysis technique used multiple linear regression with SPSS 23. The research result concluded preventive supervision did not affect the budget control effectiveness as the supervisory unit did not implement preventive supervision which in accordance with the established monitoring procedures. Furthermore, the detective supervision had positive and significant effect on the budget control effectiveness. It meant, the higher level of detective supervision, the more effectiveness of budget control would be. In addition, the budget preparation based on performance had positive and significant effect on the effectiveness of budget control. This shown as the better of budget preparation based on performance, the higher level of effectiveness of budget control would be.

Keywords: preventive supervision, detective supervision, budget based on performance, effectiveness of budget control

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengawasan preventif, pengawasan detektif, dan penganggaran berbasis kinerja terhadap efektivitas pengendalian anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Surabaya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Berdasarkan metode *purposive sampling* tersebut didapatkan sebanyak 71 sampel dari 27 Organisasi Perangkat Daerah Kota Surabaya. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS versi 23. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan preventif tidak berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian anggaran dikarenakan unit pengawas belum melaksanakan pengawasan preventif sesuai dengan prosedur pengawasan yang telah ditetapkan. Pengawasan detektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengendalian anggaran. Hal ini menunjukkan semakin tinggi tingkat pengawasan detektif maka efektivitas pengendalian anggaran juga meningkat. Penganggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengendalian anggaran. Hal ini menunjukkan semakin baik penyusunan anggaran berbasis kinerja maka semakin tinggi efektivitas pengendalian anggaran.

Kata Kunci : pengawasan preventif, pengawasan detektif, penganggaran berbasis kinerja, efektivitas pengendalian anggaran

PENDAHULUAN

Pada saat ini perkembangan ekonomi di Indonesia sangat pesat. Hal tersebut didukung dengan adanya tuntutan kemampuan manajerial untuk menyalurkan sumber daya secara efektif dan efisien. Permasalahan yang dialami oleh bangsa Indonesia juga semakin rumit. Sejumlah oknum di instansi pemerintah yang selayaknya menjadi panutan rakyat, banyak yang tersandung masalah hukum seperti penyalahgunaan wewenang, korupsi, penyalahgunaan dana proyek dan lain-lain.

Seluruh kegiatan yang ada di dalam lingkungan instansi pemerintah akan diukur dari sisi akuntabilitas kinerjanya, baik dari sisi kinerja individu, kinerja unit kerja, kinerja instansi, maupun kinerja pemerintahan secara keseluruhan (Pratama, 2014). Sebagai pembuat kebijakan, pemerintah memegang peranan penting untuk membina serta mengawasi jalannya anggaran dengan membentuk peraturan perundang-undangan dan menyiapkan aparat yang kompeten. Pengawasan pelaksanaan anggaran diawasi oleh satuan unit pelaksanaan anggaran, baik saat realisasi anggaran dan setelah realisasi anggaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Pengawasan menurut sifatnya dibagi menjadi pengawasan preventif dan pengawasan detektif. Setelah pengawasan preventif dilaksanakan, maka nantinya aparat yang ditugaskan untuk mengawasi anggaran akan melakukan pengecekan untuk memastikan bahwa anggaran telah dijalankan sebagaimana mestinya dan mengidentifikasi kesalahan yang mungkin terjadi, ini disebut dengan pengawasan detektif. Baswir (2000:118) mengatakan bahwa pengawasan sesungguhnya mencakup aspek pengendalian dan pemeriksaan yang dilakukan pihak atasan terhadap bawahan.

Dalam penerapan anggaran berbasis kinerja untuk mendukung terciptanya akuntabilitas pada instansi pemerintah sebagai pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi dalam organisasi sektor publik harus memenuhi beberapa aspek dalam akuntabilitas kinerja (Endrayani *et al.*, 2014). Penyusunan anggaran berbasis kinerja didasarkan pada target kinerja yang ingin dicapai.

Pengendalian berperan sebagai suatu pedoman untuk membantu segala kegiatan agar berjalan sebagaimana mestinya. Jadi pengendalian terhadap anggaran adalah proses untuk memastikan bahwa anggaran sampai hal yang spesifik dilaksanakan secara tepat dan efisien. Pengendalian terhadap pelaksanaan anggaran dilakukan dengan tujuan menjamin agar pengumpulan penerimaan negara dan penyaluran pengeluaran-pengeluaran negara tidak menyimpang dari rencana yang telah digariskan dalam anggaran negara. Menurut Mardiasmo (2004:134) efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Jadi, efektivitas pengendalian anggaran adalah berhasil atau tidaknya tujuan dari pengendalian terhadap anggaran tersebut dilaksanakan. Efektivitas pengendalian terhadap anggaran akan meminimalisir penyimpangan dan kebocoran anggaran.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut : (1) Apakah pengawasan preventif berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian anggaran?; (2) Apakah pengawasan detektif berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian anggaran?; (3) Apakah penganggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian anggaran?. Dan berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Untuk menguji pengaruh pengawasan preventif terhadap efektivitas pengendalian anggaran; (2) Untuk menguji pengaruh pengawasan detektif terhadap efektivitas pengendalian anggaran; (3) Untuk menguji pengaruh penganggaran berbasis kinerja terhadap efektivitas pengendalian anggaran.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Keagenan (*Teory Agency*)

Teori keagenan digunakan untuk menjelaskan bahwa pemerintah sebagai pihak pemegang amanah (agen) berkewajiban untuk menyajikan, melaporkan, serta mengungkapkan segala aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya kepada para pemberi amanah (prinsipal) dalam hal ini adalah masyarakat yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawabannya. Salah satu contoh adanya hubungan kerja antara prinsipal dan agent adalah anggaran dibuat oleh kepala daerah melalui unit-unit kerja yang disampaikan kepada kepala bagian dan diusulkan kepada kepala daerah, dan setelah itu bersama-sama DPRD menetapkan anggaran yang dibuat berdasarkan peraturan daerah yang berlaku.

Teori keagenan muncul akibat adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen sehingga timbul suatu konflik. Konflik kepentingan antara prinsipal dan agen terjadi berdasarkan asumsi bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri. Hubungan masyarakat dengan pemerintah dapat dikatakan sebagai hubungan keagenan karena adanya kontrak yang ditetapkan oleh masyarakat (prinsipal) yang menggunakan pemerintah (agen) untuk menyediakan jasa yang menjadi kepentingan masyarakat (Jensen dan Meckling, 1976).

Pengawasan

Pengawasan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Pasal 1 tentang Pedoman, Pembinaan, dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa, Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Ulum (2009), pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus menerus atau berkesinambungan untuk mengamati, memahami, dan menilai setiap pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga dapat dicegah atau diperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi. Secara umum tujuan pengawasan yaitu untuk menjamin agar pemerintahan daerah menjalankan tugasnya sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membentuk aparatur pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif meliputi desain formulir, standar, formulir-formulir yang dinomori (dinomori terlebih dahulu secara tercetak), kata-kata sandi, dokumentasi, konsistensi operasi. Widjaja (2002: 95) mengatakan pengawasan preventif pada umumnya tidak dilakukan oleh unit-unit pengawasan yang telah ditetapkan. Pengawasan preventif berbentuk prosedur-prosedur yang harus di tempuh dalam melaksanakan kegiatan. Pengawasan preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan.

Pengawasan Detektif

Menurut Baswir (2000:123), pengawasan detektif adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen-dokumen laporan pertanggungjawaban bendaharawan. Pengawasan detektif dilakukan setelah dilakukannya kegiatan, yaitu dengan membandingkan antara hal yang terjadi dengan hal yang seharusnya terjadi. Pengawasan detektif dimaksudkan untuk mengetahui apakah kegiatan dan pembiayaan yang telah ditentukan itu telah mengikuti kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Pengawasan detektif harus menunjukkan kemungkinan permasalahan yang harus diperhatikan individu-individu sehingga tindakan dapat dilakukan. Contoh dari pengawasan detektif yaitu suatu daftar dari cek pembayaran dari mereka yang bekerja. Pengawasan detektif tidak akan mencegah permasalahan sebelum timbul, tetapi cenderung menunjukkan suatu permasalahan bila permasalahan itu timbul.

Penganggaran Berbasis Kinerja

Penganggaran berbasis kinerja adalah sebuah sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan erat dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi (Bastian, 2006:171). Dengan demikian penyusunan anggaran berbasis kinerja membutuhkan suatu sistem administrasi publik yang telah ditata dengan baik, konsisten dan terstruktur sehingga kinerja anggaran dapat dicapai berdasarkan ukuran-ukuran yang telah ditetapkan.

Penganggaran berbasis kinerja merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolok ukur atau indikator kinerja sebagai instrumen untuk mencapai sasaran program dan tujuan yang telah di rencanakan dan merupakan pengelolaan anggaran dan sistem penyusunan daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti juga berorientasi pada kepentingan publik (Mardiasmo, 2002:105).

Penerapan penganggaran berdasarkan kinerja dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat dampak dari peningkatan pelayanan kepada publik. Untuk mendukung sistem penganggaran berbasis kinerja maka diperlukan suatu alat ukur kinerja yang jelas dan transparan berupa indikator kinerja, selain itu juga diperlukan sasaran yang jelas agar kinerja dapat diukur sehingga dapat dinilai efisiensi dan efektivitas dari pekerjaan yang dilaksanakan serta dana yang telah dikeluarkan untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan.

Efektivitas Pengendalian Anggaran

Pengendalian terhadap anggaran adalah proses untuk memastikan bahwa anggaran sampai hal yang spesifik dilaksanakan secara tepat dan efisien. Pengendalian terhadap pelaksanaan anggaran dilakukan dengan tujuan menjamin agar pengumpulan penerimaan negara dan penyaluran pengeluaran-pengeluaran negara, tidak menyimpang dari rencana yang telah digariskan dalam anggaran negara (Baswir, 2000:118).

Baswir (2000:118) menjelaskan bahwa pengendalian keuangan negara adalah segala tindakan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan negara berjalan sesuai dengan tujuan, rencana, dan aturan-aturan yang telah digariskan. Karena yang menjadi objek pengendalian keuangan negara terutama adalah anggaran negara, maka pengendalian keuangan negara dari segi anggaran dapat pula dinyatakan sebagai segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan penerimaan-penerimaan negara, dan penyaluran pengeluaran-pengeluaran negara, tidak menyimpang dari rencana yang telah digariskan dalam anggaran.

Efektivitas pengendalian merupakan tujuan yang ingin dicapai dari fungsi anggaran sebagai alat pengendalian. Mardiasmo (2004:134) mengatakan bahwa efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Jadi, efektivitas pengendalian anggaran adalah berhasil atau tidaknya tujuan dari pengendalian terhadap anggaran tersebut dilaksanakan.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pengawasan Preventif Terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran

Pengawasan preventif dilakukan pemerintah untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan daerah yang akan membebankan dan merugikan daerah lebih besar. Sehingga anggaran yang telah ditetapkan dapat diawasi penggunaannya sesuai dengan peruntungannya, dan tidak terjadi lagi dana-dana yang terbuang, dan tidak terserap secara penuh. Jadi pengawasan preventif sangat berhubungan signifikan terhadap efektifnya suatu anggaran. Semakin bagus pengawasan preventif yang dilakukan maka semakin bagus pula pengendalian anggaran tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fuadi (2013) dengan hasil menunjukkan bahwa pengawasan preventif berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian anggaran. Berdasarkan paparan tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H_1 : Pengawasan preventif berpengaruh positif terhadap efektivitas pengendalian anggaran

Pengaruh Pengawasan Detektif Terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran

Baswir (2000:123) mengatakan pengawasan detektif adalah bentuk pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban, yang biasanya dilaksanakan setelah dilakukan suatu kegiatan. Pengawasan detektif sesungguhnya

mencakup aspek pengendalian dan pemeriksaan yang dilakukan pihak atasan terhadap bawahan. Jadi, pengawasan detektif merupakan salah satu aspek yang mendukung untuk terlaksananya pengendalian yang efektif.

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan pengawasan detektif antara lain Baskara (2017) meneliti pengaruh pengawasan preventif, pengawasan detektif, dan penganggaran berbasis kinerja terhadap efektivitas pengendalian anggaran pada SKPD Kota Dumai. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pengawasan detektif dalam efektivitas pengendalian anggaran pada SKPD Kota Dumai. Berdasarkan paparan tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Pengawasan detektif berpengaruh positif terhadap efektivitas pengendalian anggaran

Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran

Penganggaran berbasis kinerja mendorong partisipasi dari pemerintah sehingga tujuan pencapaian hasil sesuai dengan kebutuhan publik. Legislatif diberi kesempatan untuk berperan aktif dalam penyusunan dan penetapan anggaran sebagai produk hukum. Proses penyusunan anggaran dalam berbasis kinerja dimulai dari satuan kerja yang ada di pemda, melalui dokumen usulan anggaran yang dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RK SKPD).

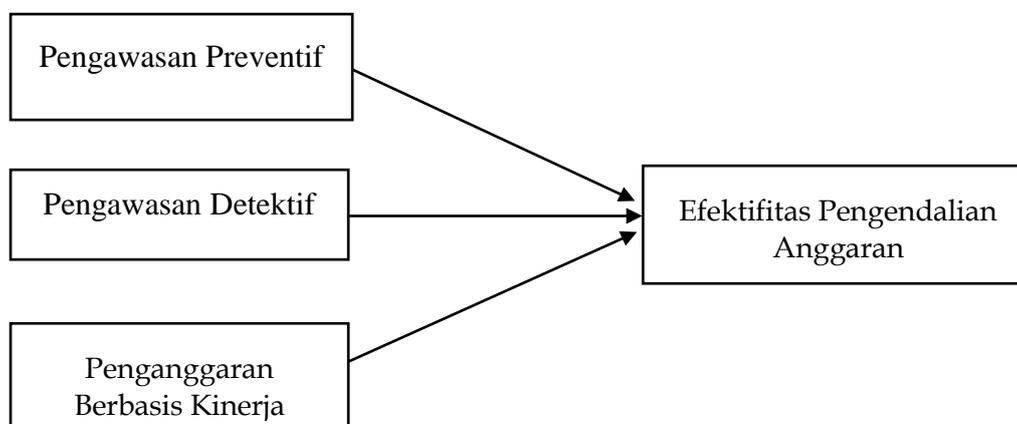
Lebih lanjut Mardiasmo (2004:31) menjelaskan anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi, yaitu alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan fiskal, alat politik, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaian kinerja, alat motivasi, dan alat menciptakan ruang publik. Sebagai alat perencanaan, anggaran merupakan rencana terperinci atas pendapatan dan pengeluaran yang akan dilakukan pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Sebagai alat pengendalian, anggaran digunakan untuk menghindari adanya *overspending*, *underspending* dan salah sasaran (*misappropriation*) dalam pengalokasian anggaran.

Berdasarkan penjelasan diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Baskara (2017) dengan hasil menunjukkan bahwa penganggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian anggaran. Berdasarkan paparan tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Penganggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap efektivitas pengendalian anggaran

Model Penelitian

Model Penelitian dalam penelitian ini adalah:



Gambar 1
Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (objek) penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dimana penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Penelitian ini merupakan penelitian survey yaitu suatu penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat untuk mengumpulkan data yang pokok. Penelitian ini dirancang sebagai penelitian *explanatory* yang bertujuan untuk mengetahui serta menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pengendalian anggaran.

Populasi dalam penelitian ini adalah kepala Dinas/Badan, Kabid/Kabag, Kasubid/Kasubbag/Kasubdis, staf bagian akuntansi/keuangan dan staf Inspektorat pengawasan OPD Kota Surabaya. Subjek penelitian yang dijadikan populasi yaitu OPD Kota Surabaya yang meliputi Dinas, Badan, Satpol PP dan Inspektorat Daerah.

Teknik Pengambilan Sampel

Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomer 14 Tahun 2016 bahwa jumlah OPD Kota Surabaya adalah 60 OPD yang terdiri dari 1 Sekretariat Daerah, 1 Sekretariat DPRD, 1 Inspektorat Daerah, 22 Dinas Daerah, 4 Badan Daerah, dan 31 Kecamatan Daerah Kota Surabaya. Pengambilan sampel atas responden dilakukan secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu cara penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel (Sugiyono, 2012:126). Sampel dapat dipilih dengan kriteria tertentu sampel dapat mendukung dalam penelitian ini. Kriteria yang ditentukan dalam penelitian ini adalah : (1) Memiliki masa kerja minimal satu tahun atau lebih; (2) Memiliki jabatan sebagai kepala Dinas/Badan, Kabid/Kabag, Kasubid/Kasubbag/Kasubdis, staf bagian akuntansi/keuangan dan staf Inspektorat pengawasan OPD di Kota Surabaya; (3) Berdasarkan pertimbangan yang terlibat dalam penyusunan anggaran di lingkungan OPD Kota Surabaya. Sehingga dari kriteria yang telah ditetapkan terdapat sampel dalam penelitian sebanyak 21 Dinas, 4 Badan, 1 Satpol PP dan 1 Inspektorat di OPD Kota Surabaya.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer. Data primer diperoleh langsung dari responden yang menjadi bagian dari sampel. Data primer tersebut berisi daftar pernyataan terstruktur yang ditujukan kepada responden. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuesioner yang diberikan oleh peneliti kepada responden secara langsung dan kuesioner diambil kembali oleh peneliti dengan waktu yang telah dijanjikan responden. Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan skala likert 1-5 yaitu Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Netral (N), Setuju (S), dan Sangat Setuju (SS).

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel Penelitian

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016:38). Dalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen.

Menurut Sugiyono (2016:39) Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Sedangkan variabel dependen yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel independen atau bebas. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengawasan preventif, pengawasan detektif, dan penganggaran berbasis kinerja. Sedangkan variabel dependen adalah efektifitas pengendalian anggaran. Pengukuran dimensi atau indikator variabel digunakan Skala *Likert*.

Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah cara mengukur dan menemukan variabel-variabel dengan merumuskan secara singkat, serta tidak menimbulkan berbagai macam tafsiran. Definisi operasional variabel ini berisi tentang pengawasan preventif, pengawasan detektif, penganggaran berbasis kinerja dan efektifitas pengendalian anggaran. Serta berisi tentang cara pengukuran variabel-variabel tersebut.

Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum dimulainya pelaksanaan suatu kegiatan, atau sebelum terjadinya pengeluaran keuangan negara. Pengawasan preventif ini biasanya berbentuk prosedur-prosedur yang harus ditempuh dalam melaksanakan kegiatan. Prosedur-prosedur yang harus ditempuh dalam kegiatan pemerintahan terdapat dalam peraturan pemerintah tentang sistem pengendalian internal. Pengawasan Preventif dilakukan oleh atasan pada OPD, yaitu kepala kantor dan kepala dinas.

Pengawasan Detektif

Pengawasan detektif adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen-dokumen laporan pertanggung-jawaban bendaharawan. Pengawasan detektif biasanya dilakukan setelah kegiatan, yaitu dengan membandingkan antara hal yang terjadi dengan hal yang seharusnya terjadi, serta untuk mengetahui apakah kegiatan dan pembiayaan yang telah ditentukan itu telah sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Penganggaran Berbasis Kinerja

Penganggaran berbasis kinerja adalah sebuah sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan erat dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi. Dengan demikian penyusunan anggaran berbasis kinerja membutuhkan suatu sistem administrasi publik yang telah ditata dengan baik, konsisten dan terstruktur sehingga kinerja anggaran dapat dicapai berdasarkan ukuran-ukuran yang telah ditetapkan.

Efektivitas Pengendalian Anggaran

Efektivitas merupakan ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Jadi, pengendalian anggaran yang efektif adalah yang dapat mencapai tujuan dari pengendalian anggaran tersebut. Pengendalian anggaran berhubungan dengan upaya yang dilakukan agar pengeluaran aktual sejalan dengan jumlah yang dianggarkan dan bahwa tujuan dan tingkat aktivitas yang dicantumkan dalam anggaran tercapai.

Statistik deskriptif

Menurut Sugiyono (2017:147) Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Statistik deskriptif digunakan untuk memberi suatu gambaran tentang demografi responden penelitian, seperti pendidikan, jenis kelamin, usia, latar belakang pendidikan, dan masa kerja yang termasuk kedalam data demografi.

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner agar data yang diperoleh relevan. Kuesioner dapat dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk menyatakan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Jadi validitas ingin mengukur apakah pertanyaan dalam kuesioner yang sudah dibuat dapat mengukur apa yang hendak diukur (Ghozali, 2016). Pengujian validitas yang digunakan dalam

penelitian ini yaitu korelasi *Pearson*. Signifikansi Korelasi *Pearson* yang digunakan adalah 0,05. Apabila nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka pertanyaan tersebut tidak valid dan apabila nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka pertanyaan tersebut valid (Ghozali, 2016).

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk (Ghozali, 2016). Kuesioner dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas diukur dengan uji statistik *Cronbach Alpha*. Suatu variabel atau konstruk dikatakan reliabel apabila memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,70 (Ghozali, 2016).

Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian terhadap hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas untuk mengetahui metode statistik yang akan digunakan. Uji normalitas dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel terikat dan variabel bebas mempunyai distribusi normal atau tidak. Untuk menguji normalitas data dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogrov-Smirnov*. Kemudian untuk menerima atau menolak hipotesis dengan cara membandingkan p-value dengan taraf signifikansi sebesar 5%. Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas yaitu : (1) Jika nilai Sig \geq 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal; (2) Jika nilai Sig \leq 0,05 maka data tersebut berdistribusi tidak normal.

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat ada atau tidaknya korelasi antar variabel independen. Untuk menguji adanya multikolinieritas dapat dilihat dari *tolerance value* dan *variance inflation factor* (VIF). Model regresi dikatakan bebas multikolinieritas jika nilai *tolerance* > 0,1 atau VIF < 10 (Ghozali 2005).

Uji heterokedastisitas dalam penelitian ini digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual pada suatu pengamatan lain. Dalam uji ini apabila tingkat signifikan > 5% maka tidak terjadi gejala heterokedastisitas tetapi apabila tingkat signifikan < 5% maka terjadi gejala heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi gejala heterokedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi linear berganda yang biasanya digunakan untuk memperhatikan dan meramalkan suatu nilai dalam hubungannya dengan variabel yang lain yang diketahui melalui garis persamaan regresinya, model regresi berganda ini bertujuan untuk mengestimasi rata-rata populasi dan nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui besarnya (Ghozali, 2016). Persamaan regresi yang digunakan adalah :

$$EPA = a + \beta_1 PP + \beta_2 PD + \beta_3 PBK + e$$

Keterangan :

EPA : Efektivitas Pengendalian Anggaran

α : konstanta

β : koefisien regresi

PP : Pengawasan Preventif

PD : Pengawasan Detektif

PBK : Penganggaran Berbasis Kinerja

e : error

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Ghozali (2016) menyatakan bahwa uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi digunakan untuk dapat menjelaskan kebaikan dari model regresi dalam memprediksi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Apabila nilai R^2 mendekati 0 menunjukkan kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen mengalami keterbatasan. Sedangkan nilai R^2 yang memiliki nilai 1 atau mendekati 1 menunjukkan kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2016:95).

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji apakah variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik dan apakah model regresi yang digunakan telah signifikan atau tidak. Uji statistik F mempunyai signifikansi 0,05 (Ghozali, 2016). Kriteria pengujian hipotesis dengan menggunakan statistik F adalah : (1) Jika nilai signifikan uji F < 0,05, maka hipotesis diterima yang menunjukkan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dan model regresi layak; (2) Jika nilai signifikan uji F > 0,05, maka hipotesis ditolak yang menunjukkan variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dan model regresinya tidak layak.

Uji Parsial (Uji t)

Uji statistik menunjukkan seberapa besar pengaruh satu variabel independen menerangkan variabel dependen dengan menanggapi variabel independen lainnya konstan (Ghozali, 2016:97). Uji t mempunyai nilai signifikansi $\alpha = 5\%$. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari α (asumsi tarif nyata 0,05) maka dapat dikatakan adanya hubungan yang kuat atau positif antara variabel independen dengan variabel dependen. Kriteria pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik adalah : (1) Jika nilai signifikansi uji t > 0,05, maka hipotesis diterima yang menunjukkan variabel independen berpengaruh secara individual terhadap variabel dependen; (2) Jika nilai signifikansi uji t < 0,05, maka hipotesis ditolak yang menunjukkan variabel independen tidak berpengaruh secara individual terhadap variabel dependen.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Dalam penelitian ini terdapat kuesioner yang pernyataan-pernyataannya dalam bentuk skala *likert* untuk masing-masing variabel, baik itu dependen maupun independen yang digunakan dalam penelitian ini. Pernyataan-pernyataan tersebut berhubungan dengan pengawasan preventif, pengawasan detektif, penganggaran berbasis kinerja dan efektivitas pengendalian anggaran.

Hasil pengujian statistik deskriptif pada tabel 1 menunjukkan bahwa variabel pengawasan preventif menunjukkan nilai minimum 21 maksimal 35 mean 30,1972 dan standar deviasi 3,24530. Nilai mean mengindikasikan bahwa jawaban responden pada variabel pengawasan preventif relatif homogen atau baik. Variabel pengawasan detektif menunjukkan nilai minimum 6 maksimal 15 mean 13,0141 dan standar deviasi 1,61681. Nilai mean mengindikasikan bahwa jawaban responden pada variabel pengawasan preventif relatif homogen atau baik. Variabel penganggaran berbasis kinerja menunjukkan nilai minimum 20 maksimal 32 mean 26,9718 dan standar deviasi 2,76184. Nilai mean mengindikasikan bahwa jawaban responden pada variabel pengawasan preventif relatif homogen atau baik. Variabel efektivitas pengendalian anggaran menunjukkan nilai minimum 15 maksimal 30 mean 25,3521 dan standar deviasi 3,25620. Nilai mean mengindikasikan bahwa jawaban responden pada variabel pengawasan preventif relatif homogen atau baik. Sehingga nilai rata-rata

pengawasan preventif, pengawasan detektif, penganggaran berbasis kinerja mempunyai pengaruh positif terhadap efektivitas pengendalian anggaran.

Tabel 1
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PP	71	21,00	35,00	30,1972	3,24530
PD	71	6,00	15,00	13,0141	1,61681
PBK	71	20,00	32,00	26,9718	2,76184
EPA	71	15,00	30,00	25,3521	3,25620
Valid N (listwise)	71				

Sumber: Kuesioner (diolah), 2019

Uji Validitas

Hasil uji validitas dari variabel pengawasan preventif, pengawasan detektif, dan penganggaran berbasis dapat dikatakan valid, karena dari *degree of freedom* (df) = N-2 jadi 71-2 = 69 dengan taraf signifikan $\alpha=5\%$, maka r_{tabel} dalam penelitian ini adalah 0,2335. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai $r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$ yakni $r_{\text{hitung}} > 0,2335$.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang digunakan reliabel atau handal. Uji reliabilitas diukur menggunakan program SPSS apabila nilai dari *Cronbach Alpha* > 0,70 maka item-item pernyataan yang membentuk variabel penelitian dapat dikatakan reliabel. Dari hasil uji reliabilitas memberikan hasil sebagai berikut :

Tabel 2
Hasil Uji Reliabilitas

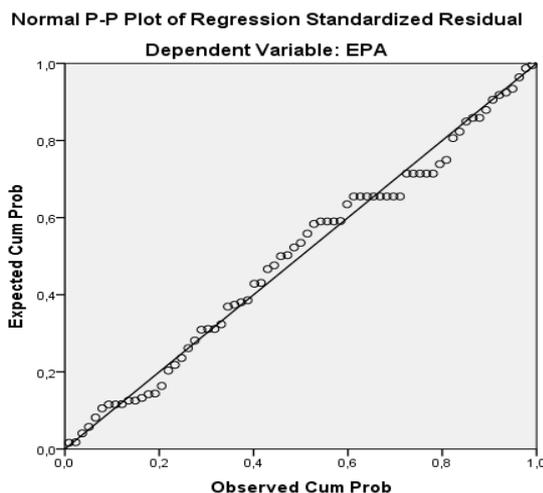
Variabel	Cronbach Alpha	Koefisien Alpha (α)	Keterangan
Pengawasan Preventif	0,843	0,70	Reliabel
Pengawasan Detektif	0,771	0,70	Reliabel
Penganggaran Berbasis Kinerja	0,769	0,70	Reliabel
Efektifitas Pengendalian Anggaran	0,855	0,70	Reliabel

Sumber: Kuesioner (diolah), 2019

Pada tabel 2 di atas menunjukkan nilai *Cronbach Alpha* untuk masing-masing variabel adalah sudah reliabel, karena nilai *Cronbach Alpha* masing-masing variabel >0,70, sehingga dapat dikatakan alat ukur yang digunakan handal atau reliabel.

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2016:154). Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi yang normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini mendeteksi apakah suatu model regresi berdistribusi dengan normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik normal *P-P Plot Regression Standardized residual*. Grafik yang didapat, bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat dikatakan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.



Gambar 2
Normal P-P Plot Regression Standardized
Sumber: Kuesioner (diolah), 2019

Uji normalitas tidak hanya di lihat dari *Normal Probability Plot* saja namun dapat dilihat dari perhitungan statistik dengan uji statistik non-parametik *Kolmogrov-Smirnov* (K-S), maka telah diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test

		Standardized Residual
N		73
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,97833678
MostExtremeDifferences	Absolute	,070
	Positive	,070
	Negative	-,064
Kolmogorov-Smirnov Z		0,592
Asymp. Sig. (2-tailed)		,874

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Kuesioner (diolah), 2019

Berdasarkan tabel 3 di atas hasil uji normalitas data dengan *Kolmogrov-Smirnov* (K-S) dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal serta memenuhi asumsi normalitas residual dilihat dari nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* yang lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,874, sehingga model regresi layak untuk digunakan.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya multikolinieritas pada suatu korelasi yang signifikan diantara variabel independen satu dengan yang lainnya. Apabila nilai *tolerance* mendekati 1, serta nilai VIF disekitar angka 1 serta tidak lebih dari 10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas antara variabel bebas dalam model regresi. Berikut hasil dari uji multikolinieritas dapat dilihat pada perhitungan statistik sebagai berikut:

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
1 (Constant)			
PP	,385	2,597	Tidak Terjadi Multikolinieritas
PD	,468	2,135	Tidak Terjadi Multikolinieritas
PBK	,675	1,481	Tidak Terjadi Multikolinieritas

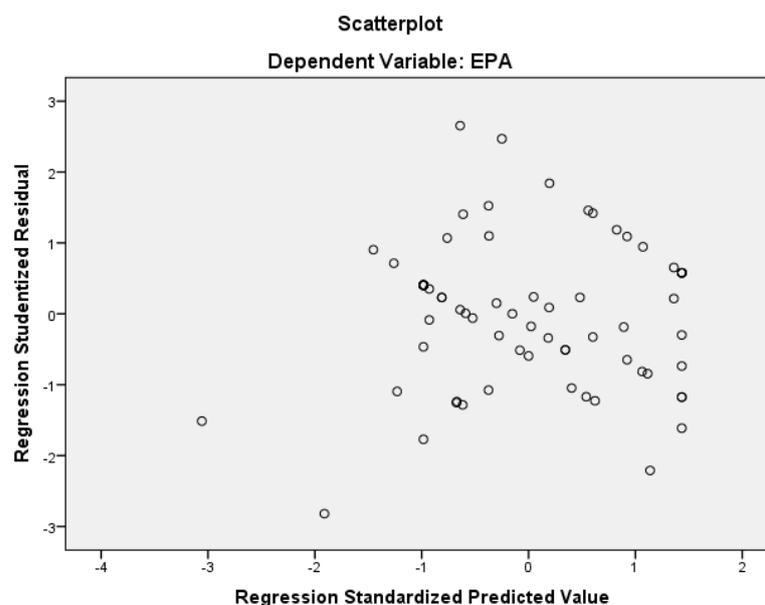
a. Dependent Variable: EPA

Sumber: Kuesioner (diolah), 2019

Berdasarkan tabel 4 di atas dapat diketahui dari semua variabel dengan melihat hasil perhitungan nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan hasil perhitungan VIF < 10, maka telah disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terjadi multikolinieritas atau tidak terjadi korelasi antara variabel dependen dan telah memenuhi asumsi uji multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah regresi terjadi ketidaksamaan varians residual dari pengamatan yang satu ke pengamatan lainnya. Berikut hasil uji heteroskedastisitas dapat dijelaskan melalui perhitungan statistik yang tertera pada gambar dibawah ini:



Gambar 3
Regression Standardized Predicted Value
Sumber: Kuesioner (diolah), 2019

Berdasarkan gambar *scatterplot* tersebut dapat dilihat bahwa tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terdapat heteroskedastisitas dan telah memenuhi asumsi uji heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui seberapa besar perubahan faktor yang digunakan dalam model penelitian yaitu mengenai pengawasan preventif, pengawasan detektif, dan penganggaran berbasis kinerja pada efektivitas pengendalian anggaran di OPD Kota Surabaya. Hasil analisis yang diperoleh disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		
1 (Constant)	,633	3,033	,209	,835
PP	,172	,139	1,242	,219
PD	,671	,252	2,659	,010
PBK	,399	,20	3,309	,002

a. Dependent Variable: AKIP

Sumber : Kuesioner (diolah), 2019

Berdasarkan tabel 5 di atas, maka prediksi efektivitas pengendalian anggaran instansi pemerintah dapat dimasukkan ke dalam persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$EPA = 0,633 + 0,172PP + 0,671PD + 0,399PBK + \epsilon$$

Persamaan regresi yang didapat menunjukkan variabel pengawasan preventif, pengawasan detektif, dan penganggaran berbasis kinerja memiliki koefisien yang bertanda positif, penjelasan untuk persamaan diatas adalah : (1) Apabila pengawasan preventif semakin baik dan jelas maka akan meningkatkan efektivitas pengendalian anggaran instansi pemerintah dan sebaliknya jika pengawasan preventif semakin buruk maka akan menurunkan efektivitas pengendalian anggaran instansi pemerintah; (2) Apabila pengawasan detektif semakin baik dan jelas maka akan meningkatkan efektivitas pengendalian anggaran instansi pemerintah dan sebaliknya jika pengawasan detektif semakin buruk maka akan menurunkan efektivitas pengendalian anggaran instansi pemerintah; (3) Apabila penganggaran berbasis kinerja semakin baik dan jelas maka akan meningkatkan efektivitas pengendalian anggaran instansi pemerintah dan sebaliknya jika penganggaran berbasis kinerja semakin buruk maka akan menurunkan efektivitas pengendalian anggaran instansi pemerintah.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Dapat dilihat hasil uji koefisien determinasi pada perhitungan statistik dibawah ini:

Tabel 6
Hasil Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,712 ^a	,508	,486	2,33543

a. Predictors: (Constant), PBK, PD, PP

b. Dependent Variable: EPA

Sumber: Kuesioner (diolah), 2019

Berdasarkan tabel 6 di atas dapat diketahui bahwa nilai uji koefisien determinasi (R²) sebesar 0,508 yang memiliki arti bahwa pengaruh variabel independen (pengawasan preventif, pengawasan detektif, dan penganggaran berbasis kinerja), serta efektivitas pengendalian anggaran instansi pemerintah sebagai variabel dependen sebesar 50,8% dan sisanya 49,2% di pengaruhi oleh faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam model.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F ini digunakan untuk menguji kelayakan model yang dihasilkan dengan menggunakan α sebesar 5%. Berikut dapat dilihat hasil uji kelayakan model (Uji F) pada perhitungan statistik dibawah ini:

Tabel 7
Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	376,765	3	125,588	23,026	,000 ^b
Residual	365,432	67	5,454		
Total	742,197	70			

a. Dependent Variable: EPA

b. Predictors: (Constant), PBK, PD, PP

Sumber: Kuesioner (diolah), 2019

Berdasarkan nilai statistik pada tabel 7 di atas dapat disimpulkan bahwa nilai F_{hitung} sebesar 23,026 dengan tingkat signifikan 0,000. Maka nilai uji F tersebut menunjukkan bahwa pengawasan preventif, pengawasan detektif dan penganggaran berbasis kinerja memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap efektivitas pengendalian anggaran instansi pemerintah.

Uji Statistik (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji hipotesis yaitu pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan variabel lain yang dianggap konstan. Berikut dapat dilihat hasil uji statistik (Uji t) pada perhitungan statistik dibawah ini :

Tabel 8
Hasil Uji Hipotesis (Uji t)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		
1 (Constant)	,633	3,033	,209	,835
PP	,172	,139	1,242	,219
PD	,671	,252	2,659	,010
PBK	,399	,120	3,309	,002

a. Dependent Variable:EPA

Sumber: Kuesioner (diolah), 2019

Berdasarkan tabel 8 menunjukkan bahwa hasil uji t dengan perumusan hipotesis sebagai berikut : (1) Pengawasan preventif tidak berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran, hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikan sebesar $0,219 < 0,005$ dan hipotesis pertama (H_1) ditolak; (2) Pengawasan detektif berpengaruh positif terhadap efektifitas pengendalian anggaran, hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikan sebesar $0,010 < 0,005$ dan hipotesis pertama (H_2) diterima; (3) Penganggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap efektifitas pengendalian anggaran, hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikan sebesar $0,02 < 0,005$ dan hipotesis pertama (H_3) diterima.

Pembahasan

Pengaruh Pengawasan Preventif terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran

Pengawasan preventif dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. Menurut Widjaja (2002:95) menerangkan bahwa

pengawasan preventif berbentuk prosedur-prosedur yang harus ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan hasil dari uji hipotesis t bahwa pengawasan preventif tidak berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian anggaran, sehingga (H_1) ditolak. Pengawasan preventif tidak berhasil meningkatkan efektivitas pengendalian anggaran karena unit pengawas belum melaksanakan pengawasan preventif sesuai dengan prosedur pengawasan yang telah ditetapkan.

Dalam hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2014) menunjukkan bahwa pengawasan preventif tidak berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian anggaran di SKPD Kabupaten Pahlawan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Baskara (2017) mengatakan bahwa pengawasan preventif berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian anggaran di SKPD Kota Dumai.

Pengaruh Pengawasan Detektif terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran

Pengawasan detektif adalah bentuk pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen-dokumen laporan pertanggungjawaban, yang biasanya dilaksanakan setelah dilakukan suatu kegiatan.

Berdasarkan hasil dari uji hipotesis t bahwa pengawasan detektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengendalian anggaran, sehingga (H_2) diterima.

Pengawasan detektif dan efektivitas pengendalian anggaran mempunyai hubungan positif artinya semakin tinggi tingkat pengawasan detektif maka efektivitas pengendalian anggaran juga meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan detektif akan meningkatkan efektivitas pengendalian anggaran.

Dalam hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Peuranda (2014) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara pengawasan detektif terhadap efektivitas pengendalian anggaran di SKPD Kabupaten Kompar.

Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran

Menurut Bastian (2006: 54) bahwa upaya untuk menciptakan pengelolaan anggaran berbasis kinerja diharapkan akan mampu memenuhi berbagai tuntutan dan kebutuhan masyarakat, yaitu terbentuknya semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses penyelenggaraan pemerintah pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya. Artinya penyelenggaraan berbasis kinerja dapat mendukung efektivitas pengendalian anggaran keuangan daerah.

Merujuk pada pendapat Mardiasmo (2002: 93) anggaran berbasis kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Anggaran dengan pendekatan kinerja sangat menekankan pada konsep *value for money* dan pengawasan atas kinerja output. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa penyusunan anggaran berbasis kinerja diharapkan menghasilkan anggaran yang lebih berkualitas sehingga lebih efektif dalam pengendaliannya.

Berdasarkan hasil dari uji hipotesis t bahwa penganggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengendalian anggaran, sehingga (H_3) diterima.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penyusunan anggaran berbasis kinerja maka semakin tinggi efektivitas pengendalian anggaran, sebaliknya semakin kurang baik penyusunan anggaran berbasis kinerja maka semakin rendah efektivitas pengendalian anggaran.

Dalam hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2016) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara penganggaran berbasis kinerja terhadap efektivitas pengendalian anggaran di SKPD Kabupaten Grobogan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh pengawasan preventif, pengawasan detektif, dan penganggaran berbasis kinerja terhadap efektivitas pengendalian anggaran. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap kuesioner yang dibagikan ke Organisasi Perangkat Daerah Kota Surabaya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) Pengawasan preventif tidak berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian anggaran dikarenakan unit pengawas belum melaksanakan pengawasan preventif sesuai dengan prosedur pengawasan yang telah ditetapkan; (2) Pengawasan detektif berpengaruh positif terhadap efektivitas pengendalian anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengawasan detektif maka efektivitas pengendalian anggaran juga meningkat; (3) Penganggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap efektivitas pengendalian anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penyusunan anggaran berbasis kinerja maka semakin tinggi efektivitas pengendalian anggaran.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh pengawasan preventif, pengawasan detektif, dan penganggaran berbasis kinerja terhadap efektivitas pengendalian anggaran di OPD Kota Surabaya, maka saran yang diambil sebagai berikut: (1) Peneliti selanjutnya sebaiknya tidak hanya menggunakan metode survey dengan cara menyebarkan kuesioner saja, tetapi juga menambahkan dengan metode wawancara secara langsung, agar peneliti dapat melihat langsung bagaimana responden memberikan jawaban; (2) Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan lingkup penelitian dengan menambahkan jumlah obyek lebih banyak misalnya menambahkan lingkup Kecamatan; (3) Organisasi Perangkat Daerah Kota Surabaya diharapkan lebih meningkatkan pengawasan preventif sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam sistem penganggaran sehingga efektivitas pengendalian anggaran bisa tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Baskara, B. Y. 2017. Pengaruh Pengawasan Preventif, Pengawasan Detektif dan Penganggaran Berbasis Kinerja terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kota Dumai). *Jurnal Online Mahasiswa* 4(1). Fakultas Ekonomi. Universitas Riau. Pekanbaru.
- Bastian, I. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga. Jakarta.
- Baswir, R. 2000. *Koperasi Indonesia*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. BPFE. Yogyakarta.
- Endrayani, K. S., I. M. P. Adiputra, dan N. A. S. Darmawan. 2014. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Dinas Kehutanan Upt Kph Bali Tengah Kota Singaraja). *Skripsi*. Universitas Pendidikan Ganesha. Bali.
- Fuadi, A. 2013. Pengaruh Pengawasan Preventif Dan Pengawasan Detektif Terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kota Bukittinggi). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Padang. Padang
- Ghozali, I. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*. Edisi Ketiga. Cetakan Ketiga. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- _____. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi Kedelapan. Cetakan Kedelapan. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Jensen, M. C. dan W. H. Meckling. 1976. The Theory of The Firm: Manajerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure. *Journal of Financial and Economics* 3: 305-360.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- _____. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.

- Nugroho, L. S. 2016. Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja, Pengawasan Preventif dan Pengawasan Fungsional terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan). *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah. Surakarta.
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomer 14 Tahun 2016 tentang *Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang *Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- Peuranda, J. H. 2014. Pengaruh Pengawasan Preventif dan Pengawasan Detektif terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kampar). *Jurnal Online Mahasiswa* 1(2). Fakultas Ekonomi. Universitas Riau. Riau.
- Pratama, D. 2014. Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja, Pengawasan Preventif Dan Pengawasan Detektif Terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Pahlawan). *Jurnal Online Mahasiswa* 1(2). Fakultas Ekonomi, Universitas Riau. Riau.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung.
- _____. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kombinasi*. Alfabeta. Bandung.
- _____. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Ulum, I. 2009. *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar*. Bumi Askara. Jakarta.
- Widjaja, G. 2002. *Pengelolaan Harta Kekayaan Negara*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.